

Judul : Harapan calon mahasiswa, program KIP-K perlu diperluas
Tanggal : Jumat, 13 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Harapan Calon Mahasiswa Program KIP-K Perlu Diperluas

SENAYAN menilai Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) masih jadi instrumen utama dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu. Makanya, penguatan program itu krusial untuk mendorong kenaikan angka partisipasi mahasiswa.

Anggota Komisi X DPR Andi Muawiyah Ramly menjelaskan, KIP-K merupakan tumpuan harapan jutaan calon mahasiswa, terutama dari keluarga tidak mampu di luar Pulau Jawa. "Jangan sampai program seksi kita di Komisi X, yaitu KIP, itu terkurangi. Kalau bisa justru ditambah. Ini betul-betul tumpuan harapan mahasiswa kepada kita," ucapnya.

Bantuan pendidikan di tingkat perguruan tinggi melalui program KIP-K tergolong sangat terbatas. Sementara itu, di jenjang dasar dan menengah, Pemerintah sudah menyalurkan dana besar melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Ketimpangan ini menimbulkan kesenjangan nyata dalam akses pendidikan tinggi bagi generasi muda. "Ketimpangan itu berdampak langsung pada ekonomi dan psikologis," tegasnya.

Dia berharap, tragedi siswa di Nusa Tenggara Timur yang mengakhiri hidupnya karena terkendala biaya pendidikan tidak terulang di masa depan. Dengan perluasan dan peningkatan jumlah KIP-K, risiko calon mahasiswa melakukan bunuh diri akibat kesulitan ekonomi bisa jauh berkurang.

"Mudah-mudahan tidak ada calon mahasiswa yang bunuh diri karena tak bisa masuk perguruan tinggi karena tidak punya biaya," tuturnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR

Kurniasih Mufidayati menambahkan, peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi harus dijadikan sebagai agenda nasional. Upaya itu harus dilakukan secara terencana, terukur, dan terintegrasi. Dan program KIP-K sudah berada di jalur yang tepat dalam membuka akses pendidikan tinggi.

Dia bilang, program itu belum cukup jika berjalan sendiri tanpa sinergi dengan skema beasiswa lainnya. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiknasaintek) mesti memiliki roadmap beasiswa nasional hingga 2029, lengkap dengan target capaian APK yang jelas. "Dengan begitu, kita bisa melihat seberapa besar kontribusi anggaran beasiswa terhadap peningkatan akses kuliah," ujarnya.

Kurniasih menyoroti perbedaan data APK antara Badan Pusat Statistik dan kementerian terkait, yang sama-sama menunjukkan angka partisipasi masih di bawah 35 persen. Artinya, dari setiap 100 anak usia kuliah, belum sampai 35 orang yang benar-benar mengenyam pendidikan tinggi.

Menurutnya, situasi ini tidak terlepas dari tantangan struktural. Seperti distribusi perguruan tinggi yang masih terpusat di Pulau Jawa, keterbatasan kapasitas kampus, serta kesenjangan kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja. Sedangkan tantangan lainnya adalah, kapasitas kampus yang belum seimbang dengan jumlah mahasiswa.

"Selanjutnya, kompetensi lulusan belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Ini harus dijawab secara sistemik, tidak parsial," jelas legislator Fraksi PKS itu. ■ PYB